

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH**

**NURUL SISWIDIYANI**

**B 111 09 120**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH:  
NURUL SISWIDIYANI  
B 111 09 120**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Bagian HUKUM ACARA  
Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh

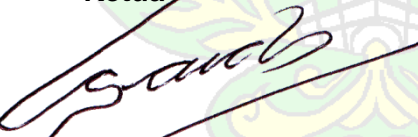
**NURUL SISWIDIYANI**

**B 111 09 120**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian HUKUM ACARA Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 13 Juni 2014  
Dan Dinyatakan Diterima

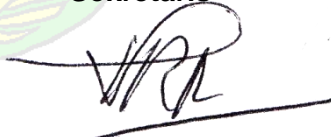
**Panitia Ujian**

**Ketua**



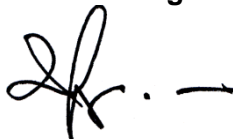
**Prof. Dr.H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.**  
NIP.196207111987031001

**Sekretaris**



**Hj. Haeranah, S.H.,M.H.**  
NIP.19661212991032002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

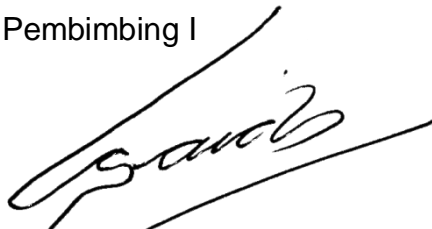
Diterangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURUL SISWIDIYANI  
No.Pokok : B 111 09 120  
Bagian : HUKUM ACARA  
Judul : TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN  
TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, Mei 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.  
NIP.196207111987031001

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP.19661212991032002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : NURUL SISWIDIYANI  
No.Pokok : B 111 09 120  
Bagian : HUKUM ACARA  
Judul : TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN  
TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
Program Studi.

Makassar, Mei 2014

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademi



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 00

## **ABSTRAK**

**NURUL SISWIDYANI AS, B11109120, Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi, di bawah bimbingan M Said Karim selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II**

Untuk Mengetahui Sejauhmanakah efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi dan Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, dengan memilih tempat penelitian di Kejaksaan Negeri Enrekang, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Dalam sistem pembuktian terbalik yang saat ini diterapkan menurut penulis belum cukup efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia (2) Kendala-kendala dalam sistem pembuktian terbalik adalah: 1)Budaya Masyarakat 2)Sistem Peradilan yang lemah 3)Terdapat Pertentangan Yuridis Dengan Berbagai Alasan

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku yang tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. Abdul Salam SE,MSi dan Ibunda Hj. Asriani yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan kepada adik-adikku yang tercinta, Nadya Aura Amalia yang telah memberi semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof.Dr. H. M Said Karim, S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang memberikan saran, bimbingan serta motivasi untuk menulis sebaik mungkin, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
4. Ibu Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H., Ibu Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Ibu Hj Nur Azisa, S.H., M.H. selaku dosen–dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan
7. Safari Parawansa untuk dukungan dan perhatiannya kepada penulis.
8. Seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu yang banyak membantu penulis dalam memberikan sumbangan pikiran dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Kajari Enrekang beserta staf yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian.



Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu dan khususnya bagi para penegak hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

NURUL SISWDYANI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian.....	8
1. Gratifikasi.....	8
2. Pembuktian.....	13
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	17
4. Pembuktian Terbalik.....	30
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penyuapan Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	34
C. Ketentuan Khusus Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).....	39
D. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi.....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>54</b>
A. Lokasi Penelitian	54
B. Jenis dan Sumber Data	54
C. Tehnik Pengumpulan Data	54
D. Analisis Data	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	<b>56</b>
A. Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi	56
B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Di Indonesia korupsi sudah sampai pada titik nadir yang tidak dapat ditolerir, begitu mengakar dan sistematis. Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Soemitro Djoyohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara 1989-1993 sebesar 30% dan hasil penelitian World Bank kebocoran dana pembangunan mencapai 45%. (Tempo, 22 Januari 1994). Sedangkan berdasarkan penelitian *Transparency International* (TI) selama lima (5) tahun berturut-turut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, Indonesia selalu menduduki posisi 10 besar negara paling korup di dunia. (*Transparency International, Corruption Perception, Index 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000*)

Selanjutnya berdasarkan penelitian *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati posisi negara

terkorup di Asia. (Tempo, 22 Januari 1994). Pada tahun 2001, posisi Indonesia pada urutan negara terkorup kedua setelah Vietnam.

Korupsi sudah terjadi pada semua aspek, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan tidak mustahil pada tahun 2002 jumlah tersebut sudah semakin meningkat. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureaucratic and judicial bribery* menyatakan bahwa penyuapan peradilan di Indonesia yang tertinggi diantara negara-negara berkembang (Adnan Buyung Nasution, 2001:2). Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkat pengadilan yang diduga kuat melakukan korupsi. Ini memperlihatkan bahwa integritas yang rendah dan kemampuan terbatas menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman empiris selama ini terlihat bahwa di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang masih belum memadai dan hambatan-hambatan penyidikan terhadap pejabat-pejabat negara, sulitnya menembus rahasia bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta rendahnya dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Reformasi mengandung arti perubahan untuk perbaikan, maka di dalam era reformasi ini perlu adanya penegakan supremasi hukum di segala aspek kehidupan, termasuk juga perbaikan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum.

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan belum memadai untuk pemberantasan korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan

diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu :

**Pertama**, pada rumusan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusan Pasal-Pasal tersebut tidak mengacu pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang HUKUM ACARA tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal Kitab Undang-Undang HUKUM ACARA;

**Kedua**, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C;

**Ketiga**, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) meskipun terdakwa telah meninggal dunia selama persidangan.

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. (Barda Nawawi Arief, 2002:216)

Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura. Dengan adanya penerapan delik sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi (A. Hamzah, 2002:78).

Beranjak dari ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik**



**dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdahulu, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni:

- Bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi.
- Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan HUKUM ACARA khususnya di bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
- Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai tindak pidana korupsi, terutama sebagai bagian dari proses penegakan hukum pada umumnya dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada khususnya.

## 2. Kegunaan Praktek

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Gratifikasi

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambahkan delik baru yaitu delik “pemberian” atau yang dikenal dalam istilah undang-undang tersebut delik gratifikasi.

Gratifikasi menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam kamus hukum gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *graatificatie* yang berarti uang, atau pemberian uang (Anonim, 2002:54).

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan (Anonim, 2002:16).

Dalam *Black's Law Dictionary*, *gratification is a gratuity, a recompence or reward for services or benefits given voluntarily, without solicitation or promise.* (Anonim, 2002:216).

Dari ketiga pengertian di atas terlihat, bahwa :

- 1) Di dalam pengertian *gratification*, terkandung unsur bahwa pemberian itu dibuktikan sebagai persenan atau imbalan, jasa/hadiah oleh orang yang pernah, mendapat pelayanan atau keuntungan (*service or benefits*) atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik/pemerintah untuk misalnya mendapatkan kontrak.
- 2) Penerimaan pemberian itu sudah dipandang sebagai delik korupsi kecuali dibuktikan sebaliknya (berarti dengan sistem pembuktian terbalik), tetapi tetap harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pemberian itu dilakukan oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan lembaga publik/pemerintahan.

Setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) dianggap sebagai suap apabila maksud dan tujuan pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerimanya dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berkenaan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana suap sangat terkait erat dengan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi apabila PNS atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ancaman pidana dapat diiadakan.

Berkenaan dengan gratifikasi sebagai suap, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf (a) terlihat bahwa gratifikasi mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian. Kemudian Pasal 12 C menyatakan apabila si penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal ini merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi, perluasan terhadap alat bukti atau bukti petunjuk perlu dilakukan sehingga akan lebih efektif, artinya si terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga oleh jaksa penuntut umum mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal dugaan, dimaksud adalah diadakan penegasan perihal bukti

permulaan yang cukup, yang akan berdampak pada perluasan terhadap alat bukti petunjuk.

Apabila dalam gratifikasi, terdakwa berhasil membuktikan bahwa pemberian yang didapat bukan mempunyai unsur korupsi, maka pembalikan beban pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai suatu dasar bagi hakim memutus perkara tersebut bahwa dakwaan tidak terbukti. Dalam pembalikan beban pembuktian tersebut juga harus dilakukan keseimbangan pembuktian oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim memiliki alasan yang cukup dan meyakinkan untuk memutuskan perkara tersebut.

Di samping itu juga pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi bukan berarti mengabaikan asas peradilan yang *fair* dan tidak memihak (*impartial*).

Dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi juga harus didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa, sistem pengawasan terhadap lembaga atau badan-badan peradilan yang efektif. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan internal atau eksternal. Mekanisme pengawasan eksternal maupun internal harus memiliki daya dukung yang kuat serta partisipatif dalam kerangka *social control* terhadap badan peradilan, hal ini dimaksudkan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

## **2. Pembuktian**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh man yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi beberapa orang akan berbeda-beda.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Dusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materil itu (Andi Hamzah, 2005:426).



Dalam alasan mencari kebenaran materil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem itu disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*) (Andi Hamzah, 2005:247).

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori

pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime* (Andi Hamzah, 2005:248).

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis (AndiHamzah, 2005:248).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2005:248), sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan media atau dukun.

c. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas

tertentu (*laconviction raisonnee*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewujsstheorie*) (Andi Hamzah, 2005:248).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

d. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*Negatif Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned Sc (Andi Hamzah, 2005:249), yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :

Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan

bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) (Andi Hamzah, 2005:252).

Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang menegaskan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2005:253) mengemukakan bahwa :

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

### **3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian**

#### **Alat Bukti**

KUHAP telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

#### 1. Keterangan saksi

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

##### a) Syarat sahnya keterangan saksi

- Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) : sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yg sebenarnya.

- Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- 1) Yang saksi lihat sendiri
  - 2) Saksi dengar sendiri
  - 3) Dan saksi alami sendiri
  - 4) Serta menyebut alasan dengan pengetahuannya itu.
- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1)
  - Keterangan saksi saja tidak cukup. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus di penuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti.
  - Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Keterangan beberapa saksi baru dapat bernilai sebagai alat bukti serta kekuatan pembuktian , apabila keterangan saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang suatu kebenaran suatu keadaan tertentu.
- b) Cara menilai kebenaran keterangan saksi.
- Dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi , Pasal 185 ayat (6) menurut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan .:
- Persesuaian antara saksi

- Persesuaian keterangan antara saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. (Pasal 186 KUHAP) menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di siding pengadilan) keterangan tersebut diberikan setelah orang ahli mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim

Alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

a) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk berikut ini :

- Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan.
- Atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan.

b) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang.

Tatacara dan bentuk kedua ialah keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Permintaan keterangan ahli dan pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli.

### 3. Surat

Yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dengan sumpah , yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang termuat keterangan tentang kejadian keadaan yang di dengar dilihat atau yang dialaminya sendiri dengan disertai alat bukti yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dapat diminta dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan telah terjadi suatu tindak pidana . petunjuk dimaksud hanya diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa
- d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP.
- e) Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain antara lain.
  - Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain.
  - Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
  - Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru dilakukan pada tingkat keadaan dengan

upaya pembuktian tidak mungkin diperoleh lagi diperoleh alat bukti yang lain.

#### 5. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang “terdakwa nyatakan” disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri.

### **Kekuatan pembuktian**

#### 1. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan di kelompokkan pada dua jenis:

- a) Keterangan saksi menolak bersumpah, tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161. sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, Pasal 161 ayat (2) menilai kekuatan pembuktian keterangan

tersebut “dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah,

Hal ini bias terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan disidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik keterangan kesaksian yang dibacakan disidang pengadilan. Namun demikian , kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) di hubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya:

- Dapat dipergunakan “ menguatkan keyakinan” hakim.

- Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya.
- c) karena hubungan kekeluargaan. Seperti yang sudah dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Barangkali untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7):
- Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
  - Tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim,
  - Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.
- d) saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” disidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur

dalam Pasal 161 ayat (2), maupun Pasal 169 ayat 2 dan penjelasan Pasal 171. bertitik tolak dari ketentuan ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:

- Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah” walupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”
- Tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian.
- Akan tetapi “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian yang sah.

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi . dapat diikuti penjelasan berikut :

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.
- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

3. Nilai kekuatan pembuktian surat

Sampai sejauh manakah kekuatan pembuktian alat bukti surat?  
Apakah alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan

- Ditinjau dari segi formal, ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan.
- Ditinjau dari segi materiil, dari sudut materiil semua alat bukti surat yang disebut Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang “bersifat bebas” tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya tidak mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar alasan

ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- Asas pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau “kebenaran sejati” (materiel waarheid)
- Asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”
- Asas minimum pembuktian , ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang bernilai sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan alat bukti lainnya.

#### 4. Nilai kekuatan pembuktian petunjuk

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan

saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakanya sebagai upaya pembuktian.
- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

#### 5. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut.

- Sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas menilai kebenaran yang terkandung didalamnya.

- Harus memenuhi batas minimum pembuktian.

Sebagaimana telah diuraikan pada asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim. Yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) , yang menentukan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia



bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

- Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Hal ini pun sudah berulang kali dibicarakan. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

#### **4. Pembuktian Terbalik**

Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya, sehingga dalam hal ini setiap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sah kekayaan yang diperolehnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 A, 38 A dan 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Di dalam perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi, perlu digolongkan sebagai kejahatan yang harus dilakukan secara luar biasa. dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus, salah satunya dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa

wajib dibebankan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenal adanya pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Secara konseptual, pembahasan mengenai pembuktian terbalik akan diarahkan pada konteks yang lebih proporsional sebagai suatu "sistem". Dalam hukum acara pidana, pembuktian dipahami sebagai suatu kerangka sistem. Olehnya, dalam memudahkan pembahasan sistem pembuktian terbalik, maka penulis akan mengarahkan

pembahasan ini pada kerangka sistem yang sistemik sebagai perangkat analisisnya. Pada konteks filosofisnya sistem memiliki makna ganda dalam artian bahwa sistem sebagai kerangka metodologi dan sistem sebagai suatu entitas. Jika sistem dipahami sebagai suatu kerangka metodologi, maka pembahasan ini akan lebih bersifat parsial karena akan mengarah pada aspek proseduralnya saja, yang merupakan sub sistem dari sebuah sistem. Tetapi, sistem dalam pemahaman sebagai entitas maka alur skematiknya akan berada pada aras input, proses, interaksi, dan output.

Sistem pada kerangka terminologinya pada dasarnya istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, *sistema* yang berarti sesuatu yang terorganisir, suatu keseluruhan yang kompleks. Menurut Effendi, dkk (1991:98), sistem mengandung pengertian bahwa terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Apabila penulis mengacu pada pengertian di atas, maka sistem hukum pembuktian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan. Pada pembahasan kerangka “sistem hukum” terdapat tiga unsur yang saling berhubungan dengan

yang lainnya, yaitu substansi hukum (*substansi of law*), struktur hukum (*structure of law*), kultur hukum (*culture of law*) yang saling berintegrasi dengan yang lainnya.

Jadi menurut hemat penulis, sistem pembuktian terbalik adalah suatu rangkaian pembuktian dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

## **B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penyuapan sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ayat (1) Pasal ini adalah menyangkut suap aktif, yang menghukum setiap orang (perseorangan dan korporasi) yang memberi atau menjanjikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi pelaku dari tindak

pidana korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah setiap orang, yakni orang perseorangan dan korporasi. Dimana korporasi itu dapat terdiri dari badan hukum dan perkumpulan. Adapun badan hukum itu terdiri dari Perseroan Terbatas, Koperasi, sedangkan perkumpulan itu dapat berupa firma, CV atau organisasi massa, partai politik, organisasi kepemudaan, LSM, dan sebagainya.

Adapun yang dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, memberi berarti menyerahkan sesuatu, sedangkan menjanjikan berarti akan memberikan atau menyerahkan, akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya.

Pemberian (hadiah) atau janji itu dapat diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut Pasal 92 KUHP yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) itu terdiri dari :

- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, misalnya anggota MPR, DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa dan sebagainya.

- b. Orang yang karena pengangkatan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah, atau atas nama pemerintah.
- c. Semua anggota Dewan *Waterschap*.
- d. Semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- e. Hakim termasuk hakim wasit (arbitrase), hakim peradilan administratif (hakim P4D, P4P, hakim sengketa pajak) serta hakim pengadilan agama.
- f. Semua anggota angkatan perang (TNI).

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pegawai negeri dapat dibagi 2 (dua), yakni pegawai negeri sipil di daerah dan pegawai sipil daerah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

Sedangkan penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1



butir 1). Penyelenggara negara itu meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara, pejabat negara dan/atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang di dalam ayat (1) ini adalah harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya, perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban

Sedangkan pada ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maksud dari pemberian itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, kewajiban ini harus dilihat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pada *job description* dari jabatan atau penyelenggara negara tersebut.

Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang suap pasif, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pembayaran atau janji. Jadi, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu bukan hanya orang yang menyuap yang dihukum, melainkan juga orang yang menerima suap tersebut. Ketentuan demikian dapat merangsang orang untuk tetap merahasiakan terjadinya tindak pidana korupsi, sebaiknya orang yang mengadukan adanya tindak pidana korupsi, walaupun mungkin ia terlibat di dalamnya seharusnya dibebaskan dari tuntutan hukum.

### **C. Ketentuan Khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak**

#### **Pidana Korupsi (TPK)**

Asas-asas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Darwan Prints, 2002:23)

1. Pelakunya adalah setiap orang  
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pengertian setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari badan hukum dan perkumpulan orang (Pasal 1 angka 3)
2. Pidananya bersifat kumulasi dan alternatif  
Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur Pasal-Pasal mengenai tindak pidana korupsi, dimana diatur ancaman pidananya bersifat kumulatif dan alternatif seperti ternyata dari rumusan Pasal-Pasalnya yang berbunyi "...dipidana penjara... tahun atau denda ... Rp....". Adanya perkataan "dan atau" jelas menunjukkan pidana bersifat kumulasi atau alternatif.
3. Adanya pidana minimum dan maksimum  
Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil.

4. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (delik formil)
5. Setiap orang (orang perorangan dan korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
6. Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) seperti :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
7. Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah lama memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
8. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3), maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Bila tidak ditentukan, maka tidak bisa digantikan.
9. Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana (Pasal 21).
10. Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana (Pasal 22).
11. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
12. Dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27).

13. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang ataupun korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28).
14. Penyidik/penuntut umum/hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka.
15. Identitas pelapor dilindungi (Pasal 31).
16. Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)).
17. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)).
18. Ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara (Pasal 35 ayat (1)).
19. Instansi yang dirugikan dapat menggugat (Pasal 35 ayat (1)).
20. Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian kecuali petugas agama (Pasal 36).
21. Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 37).
22. Dapat diadili secara *in absentia* (Pasal 38 ayat (1)).
23. Hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 30 ayat (5)).
24. Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan (Pasal 38 ayat (7)).
25. Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **D. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

ayat (2) menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan alat-alat bukti, Jaksa mempunyai beban untuk membuktikan (*burden of proof*) unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atas dasar alat-alat bukti yang ada. Tanpa adanya alat bukti tidak mungkin ada pembuktian, dua hal tersebut akan berkaitan dengan keyakinan yang merupakan kondisi subyektif yang dihasilkan melalui proses pembuktian. Secara umum beban pembuktian dalam kasus kriminal berada pada jaksa penuntut umum.

Di Indonesia pembalikan beban pembuktian (*reversing the burden of proof*) sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 22 menegaskan bahwa Pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktian. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini

dimaksudkan untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Akan tetapi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut lebih pada apa yang dinamakan *strict liability* (*liability without fault*), terdakwa (atau tergugat dalam kasus perdata) bebas dari pertanggungjawaban (*liability*) kesalahan, apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat kesalahan korban/penggugat. Hal senada juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tidak merupakan "*Lex Specialis*" dari Pasal 163 HIR dan 1365 BW (kasus perdata) yang antara lain berbunyi... "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hal atau peristiwa itu. Kalau dikatakan "*lex specialis*", maka semestinya tidak terbatas pada masalah kesalahan, tetapi terhadap keseluruhan peristiwa, misalnya hubungan kausalitas. Dalam studi perbandingan hukum tidak dikenal pembalikan beban pembuktian dalam arti luas dalam arti : (a) tanpa adanya dugaan adanya tindak pidana KKN, seorang harus membuktikan asal-usul kekayaannya; (b) tanpa adanya status tersangka atau terdakwa seseorang harus membuktikan asal usul kekayaannya. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab fungsi kekuasaan disamping harus mengendalikan kejahatan (*crime control*) juga tetap harus melindungi hak-hak individu (*due process*). Dalam hal ini terkait asas praduga tidak

bersalah (*presumption of innocence*) sebagai lawan praduga bersalah (*presumption of guilt*). Pengaturan HUKUM ACARA tidak boleh mengesankan adanya kepanikan (*panic regulation*) yang menyimpang dari asas-asas hukum. Sikap berkelebihan justru akan menimbulkan ketidakadilan (*miscarriage of justice*) dan membuka peluang untuk terjadinya ekses seperti pemerasan (*extortion*), rasa was-was di masyarakat.

Di dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sistem pembalikan beban pembuktian sudah lama diterapkan oleh beberapa negara diantaranya Malaysia, Hongkong dan Singapura. Di Malaysia dalam *Anti Corruption Act* (ACA) pada Pasal 42 menyatakan bahwa semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa (Andi Hamzah, 2002:39).

Maksud ketentuan ini bahwa jaksa penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (*gratification*), selebihnya dianggap ada dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in stryd met zijn plicth*) Ini sama dengan Pasal 42, terutama ayat (2) *Anti Corruption Act* (ACA) Malaysia yang mengatakan unsur selebihnya dalam Pasal 161, 162, 163 atau 164 Penal Code (KUHP Malaysia) :

*.....it ia proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or accepted to obtain any clarification, such person shall be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary ia proved." Dari kata-kata..... as a motive or reward for the matters set out if? the particulars of the offence...."* merupakan bagian inti (*bestanddelen*) atau unsur yang harus dibuktikan sebaliknya oleh si penerima. Artinya si penerima harus dapat membuktikan, bahwa pemberian (*gratification*) itu bukan motif atau imbalan mengenai hal-hal yang disebut dalam rumusan (Andi Hamzah, 2002:40).

Selanjutnya dalam *The Statutes of Prevention Of Corruption Act* (1961) juga diatur mengenai *Presumption of Corruption in Certain Cases* yang bunyinya sebagai berikut (Andi Hamzah, 2002:40) :

*Where in any proceeding against a person for an offence under section 3 or 4 it ia proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary ia proved.*



Dalam *The Statutes of Prevention Of Corruption* (1961) tersebut juga mengemukakan bahwa gratifikasi yang diterima oleh seseorang atau badan publik karena jabatannya dapat dianggap korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.

Di dalam *Prevention of Corruption Act* (PCA) di Singapura diatur mengenai sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Singapura dan Malaysia. Pada *Anti Corruption Act* (ACA) Malaysia mencantumkan sistem pembalikan beban pembuktian pada bagian acara (pembuktian) sedangkan *Prevention of Corruption Act* Singapura menjadikan sistem pembuktian terbalik bagian dari rumusan delik yang dimuat dalam Pasal 8 *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang berbunyi (Andi Hamzah, 2002:64).:

*Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department thereof or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned unless the contrary is proved.*

Pasal ini menyatakan apabila pemberian seseorang atau badan swasta kepada pejabat pemerintah yang melakukan atau mencari kontak dan melakukan perjanjian dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, tindakan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya.

Selanjutnya agar sistem pembalikan beban pembuktian dapat tercapai secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan adanya beberapa prinsip umum peradilan yang harus dijadikan jiwa dan dasar acuan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Independensi dan Tidak Memihak (*Imparsial*)

Prinsip independensi dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal berbagai ketentuan hukum internasional. Prinsip ini menghendaki lembaga peradilan yang terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain. Rekan kerja atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar pengadilan sehingga mempengaruhi keputusan hakim. Sedang prinsip tidak memihak pada intinya menghendaki bahwa hakim dalam mengambil keputusan bersifat tidak membedakan dan menghargai secara adil dan seimbang hak-hak para pihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan bias.

2. Kompeten

Prinsip kompeten adalah prinsip yang menjamin bahwa Hakim yang memiliki kemampuan (kompeten) yang dapat menjadi Hakim Pengadilan Korupsi, sehingga putusan yang diambil adalah putusan yang berkualitas.

3. Akuntabilitas

Prinsip ini menghendaki setiap pelaksanaan kekuasaan, apakah itu dalam penentuan kebijakan, pengambilan keputusan dan

sebagainya, harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

#### 4. Partisipatif

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang esensial dalam negara demokratis. Partisipasi paling tidak dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi dalam membentuk keputusan (agar keputusannya lebih berkualitas dan aspiratif) dan dalam melakukan kontrol (untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan).

#### 5. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan menjadi penting untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu, agar prinsip akuntabilitas dan partisipatif dapat berjalan efektif, diperlukan adanya transparansi dalam keseluruhan proses peradilan, selama tidak merugikan/mengganggu upaya penegakan hukum.

#### 6. Kepastian Hukum

Untuk menjamin keadilan karena menempatkan suatu pihak dalam posisi tidak pasti, tentunya merupakan bentuk ketidakadilan tersendiri.

#### 7. Waktu Yang Memadai Untuk Pembelaan

Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan satu pembelaan adalah hak yang penting untuk menjamin persidangan yang adil (*fair trial*). Hak ini perlu dijamin pada semua tahapan dari persidangan. Yang termasuk waktu yang memadai akan tergantung atas sifat dari acara persidangan dan keadaan yang sesungguhnya dari kasus korupsi. Fakta yang perlu dipertimbangkan adalah

kompleksitas dari suatu kasus korupsi, akses terdakwa atas barang bukti dan sebagainya.

#### 8. Jaminan dari Upaya yang Bertentangan dengan Hukum

Setiap orang berhak untuk dilindungi atas adanya tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum. Hak ini memberikan jaminan bahwa pemasangan kebebasan hak asasi manusia oleh hukum, demi kepentingan penegakan hukum, tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

#### 9. Mudah Diakses dan Cepat

Keadilan harus menjadi milik semua orang. Oleh karena itu proses memperoleh keadilan, melalui pengadilan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi hak setiap orang untuk memperoleh Keadilan atau (*access to justice*). Inilah yang dimaksud dengan prinsip mudah diakses. Prinsip mudah diakses meliputi kemudahan dari aspek finansial (biaya yang murah), geografis (lokasi pengadilan yang terjangkau), prosedural (prosedur beracara yang sederhana) dan lain-lain. Sedang yang dimaksud dengan prinsip cepat adalah proses yang harus ditempuh oleh pencari keadilan, untuk memperoleh keadilan, tidak memakan waktu yang lama.

#### 10. Hak Untuk Banding

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk banding ke pengadilan yang lebih tinggi bila yang bersangkutan tidak puas

dengan putusan pengadilan di suatu tingkat. Prinsip ini biasa dikenal dengan *right to apple*. Prinsip ini sejalan dengan bentuk akuntabilitas Hakim dalam memutus perkara. (Pengadilan Khusus, LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, Jakarta, 2002:9)

Berdasarkan teori ketaatan hukum H.C. Kelman (Achmad Ali, 1998:166) tentang efektivitas hukum, ada tiga hal yang dijadikan tolak ukur apakah suatu aturan perundang-undangan dapat berjalan efektif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

1. *Compliance*, orang taat hukum karena akan dikenakan sanksi.
2. *Identification*, orang taat hukum karena takut hubungan baiknya dengan penegak hukum terganggu.
3. *Internalization*, orang taat hukum karena sadar bahwa hukum sudah sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Maksudnya bahwa ketika dia taat hukum maka itu akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*good governance*) sesuai dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sehingga praktek-praktek usaha yang menguntungkan kelompok tertentu atau pribadi tertentu dapat dihindarkan.

Pemerintah sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada tanggal 16 Agustus 1999 telah mengundang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya justru banyak menimbulkan kontroversial. Tidak dimuatnya Ketentuan Peralihan dan penerapan asas HUKUM ACARA sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mewarnai kontroversi dan perbedaan penafsiran/interpretasi baik dikalangan praktisi hukum, akademisi maupun dalam praktek peradilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dianggap tidak efektif dan belum mampu menanggulangi korupsi serta menjerat para koruptor dalam jeratan hukum, mengingat sistem pembalikan beban pembuktian yang tertuang dalam undang-undang tersebut sistem pembalikan beban pembuktian dan terbatas.

Oleh karena itu dalam usaha untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mengakhiri kontroversi serta memenuhi tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada

tanggal 21 Mei 2001 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melalui suatu proses pembahasan di DPR, pada tanggal 21 Nopember 2001 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa suatu perubahan yang dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pokok-pokok perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut antara lain meliputi (Martiman, 2001:24) :

1. Penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu.
2. Ketentuan maksimum pidana penjara dan denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya.
4. Perluasan alat bukti.
5. Ketentuan pembuktian terbalik sebagai *premium remidium*.
6. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana.
7. Penegasan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam ketentuan peralihan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditinjau dari sisi materi

muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya laku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, yaitu pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Enrekang dikarenakan tingginya kasus korupsi di kabupaten enrekang.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

###### **1. Data primer**

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian langsung di Kejaksaan Negeri Enrekang dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Enrekang, serta 1 orang hakim yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi.

###### **2. Data sekunder**

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data laporan, arsip-arsip di Kejaksaan Negeri Enrekang serta studi pustaka mengenai sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi.

##### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Enrekang, 3 orang jaksa serta 1 orang hakim yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data laporan, arsip-arsip di Kejaksaan Negeri Enrekang serta studi pustaka mengenai sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi.

#### **D. Analisis Data**

Data yang berhasil dihimpun melalui wawancara dan menganalisis berbagai literatur (buku-buku) serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan materi ini, setelah lengkap, kemudian diolah dan disusun. Akhirnya semuanya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian skripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi**

Korupsi merupakan jenis kejahatan white collar crime di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pejabat baik sector public maupun swasta, orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan, dan orang yang memiliki strata ekonomi di atas rata-rata, memiliki tingkat edukasi yang tinggi sehingga dapat “beroperasi” secara professional sehingga tindak pidana korupsi ini sering disebut sebagai extra ordinary crime dimana hukum sangat sulit untuk menyentuhnya dan sulit dalam pembuktiannya sehingga diperlukanlah extra ordinary enforcement dalam pemberantasannya

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam HUKUM ACARA korupsi Indonesia adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap.

Banyak orang menganggap bahwa sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31. tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih baik, karena menganut sistem pembuktian terbalik Dengan pemikiran bahwa sistem terbalik

lebih mudah untuk membuktikan Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi yang didakwakan, sehingga secara otomatis lebih mudah pula untuk memberantas korupsi/gratifikasi. Pendapat seperti itu ternyata tidak seluruhnya benar.

Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*)

Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penerapan pembuktian terbalik menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A dan 38 B.

Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

- (1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2). Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dimana Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4). Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 37A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

- (1). Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2). Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada Pasal 38A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Pada Pasal 38B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2). Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3). Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.

- (4). Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5). Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6). Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemansiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.



Apabila ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem :

- Pertama sistem terbalik;
- Kedua sistem biasa (seperti KUHAP, kewajiban pada Jaksa Penuntut Umum dengan prinsip: negative berdasarkan Undang-undang yang terbatas); dan
- Ketiga semi terbalik atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik.

Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas presumption of innocence.

Sistem terbalik hanya berlaku pada :

- Pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a); dan
- Kedua, terhadap harta benda yang belum didakwakan , tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, maksudnya beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa

penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

Sistem biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang diletakan pada syarat nilai Rp.10 Juta atau lebih atau kurang dari Rp. 10 juta pada korupsi suap menerima gratifikasi, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi ini dapat disebut juga dengan sistem pembebanan pembuktian bersyarat. Disebut berimbang, karena beban pembuktian itu diberikan kepada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Disebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal perimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah diletakan pada syarat mengenai nilai korupsi suap penerima gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri si pembuat. Apakah lebih atau kurang dari nilai Rp 10 Juta.

Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah:

- a. pertama : pada korupsi suap penerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A). pembuktian terbalik pada korupsi suap penerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsure-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
- b. kedua : pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal

terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal

Dalam beberapa Pasal pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur mengenai ketentuan pembuktian terbalik namun dalam kenyataannya dipersidangan maupun dalam putusan sangat jarang ditemukan adanya penerapan pembuktian terbalik. Dalam kasus-kasus gratifikasi yang seharusnya dapat diterapkan pembuktian terbalik namun pada kenyataannya pada putusan tersebut tidak diadakan pembuktian terbalik.

Wawancara yang penulis lakukan Sulta Donna Sitohang selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengatakan bahwa “pendapat orang-orang mengenai pembuktian terbalik itu mudah dilakukan, namun dalam prakteknya hal tersebut sulit untuk diterapkan”. Hal ini terjadi karena sekarang kebanyakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi biasanya bukan atas nama dari pelaku korupsi tersebut. Pelaku korupsi tersebut melakukan pencucian uang guna menutupi harta kekayaan yang dimiliki dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga akan sulit jika harus diadakan pembuktian terbalik. Selain itu, pembuktian terbalik tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdakwa mengajukan pembuktian terbalik tersebut pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan kasasi serta Hakim wajib membuka persidangan yang

husus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa, sehingga terkadang ada beberapa hakim yang berpikiran bahwa pembuktian terbalik itu hanya membuang-buang waktu serta memperpanjang jangka waktu persidangan

Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik belum diterapkan secara efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Sehingga nantinya pembalikan beban pembuktian ini bisa membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Serta tidak hanya sekedar menjadi sebuah aturan yang tidak diterapkan secara efektif dan sangat jarang dipergunakan.

## **B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik**

Adapun kendala yang akan muncul di lapangan dan prakteknya dalam penerapan sistem Pembuktian Terbalik adalah sebagai berikut:

### **1. Budaya Masyarakat**

Budaya masyarakat jaman kerajaan dahulu yaitu memberikan upeti kepada pejabat. Jika mereka mengalami suatu permasalahan dan meminta bantuan maka mereka akan memberikan upeti kepada pejabat tersebut. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam gratifikasi mengingat adanya kerjasama antara gratifikator aktif dan pasif mengingat hubungan dari mereka yang berusaha

untuk saling menguntungkan kedudukan mereka sehingga manipulasi Pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## 2. Sistem Peradilan yang Lemah

Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kurang terpadunya keempat komponen tersebut dapat terlihat dari ajang perlombaan untuk mencari lahan keuntungan. Perbedaan persepsi masih sering terjadi antara jaksa, polisi, dan hakim. Maka banyak putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam peraturan karena ketidakterpaduan ini. Padahal Sistem Pembuktian Terbalik perlu dipahami sebagai suatu delik oleh 4 komponen sistem peradilan pidana tersebut sehingga mempunyai pemahaman yang sama dalam penerapan Pembuktian Terbalik serta delik itu sendiri.

## 3. Terdapat Pertentangan Yuridis Dengan Berbagai Alasan

Penerapan pembalikan beban pembuktian ini potensial dan melanggar prinsip HAM, khususnya perlindungan hak Terdakwa. Hak tersebut telah diatur dalam KUHAP dan hak yang rawan untuk dilanggar adalah hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*)

Asas ini dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas "Presumption Of Innocence" atau asas praduga tak bersalah. Rawan dan potensial terjadi Judicial Crime. Merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan : "Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah." (*Non Self Incrimination*).

Bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP : "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"

Bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP : "Keterangan terdakwa saja , tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,"

Bertentangan dengan Prinsip Hukum "Barang siapa yang mendalilkan, maka dia pulalah yang harus membuktikan"

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam sistem pembuktian terbalik yang saat ini diterapkan menurut penulis belum cukup efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia.
2. Kendala-kendala dalam sistem pembuktian terbalik adalah:
  - Budaya Masyarakat
  - Sistem Peradilan yang lemah
  - Terdapat Pertentangan Yuridis Dengan Berbagai Alasan

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu kiranya ada regulasi yang jelas dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur substansi mengenai sistem pembuktian terbalik agar dalam penerapannya dapat diterapkan secara efektif dilakukan.



2. Adanya pengetahuan serta integritas yang memadai dari penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dapat diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 2001. *Implementasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan KKN*. Makalah yang disampaikan di Universitas Indonesia, 3 Januari 2001.
- Achmad Ali. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*. Hasanuddin University Press.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. Hasanuddin University Press.
- \_\_\_\_\_. 1998 *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. PT. Yasrif Watanpone, Jakarta
- Adnan Buyung Nasution. *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi Tekad dan Perangkat Baru Menyapu Korupsi*. Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Hotel Santika Bandung, 2 Mei 2001.
- Andi Hamzah. 1984. *Korupsi Di Indonesia*. Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Perkembangan HUKUM ACARA Khusus*. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*.
- Baharuddin Lopa. 1957. *Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Perkembangan HUKUM ACARA Khusus*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001.

- Chairuman Harahap. *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semangat Baru dalam Pemberantasan Korupsi*. Disampaikan pada Lokakarya Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerja sama dengan Asian Development Bank, Hotel Istana, Medan, 2000.
- Departemen Kehakiman & HAM, Tim Pakar Hukum. 2001. *Reformasi Hukum Di Indonesia, Sebuah Keniscayaan*. Pelita Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*. Catatan dan Gagasan Prof Yusril Ihza Mahendra.
- Rusli Effendy. 1991. *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- ELSAM. 2000. *Dimensi-dimensi HAM pada Administrasi Keadilan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan.
- Indonesia Corruption Watch. *Meyungkap Tabir Mafia Peradilan (Hasil Monitoring Peradilan ICW*. Dipersiapkan untuk penelitian Pola--Pola Korupsi pada proses beracara di Peradilan Umum, Jakarta, Juni 2001.
- Loebby Loqman. 1998/1999. *Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. BPHN, Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai HUKUM ACARA*. Alumni Bandung.
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor, Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.

Teten Masduki. *Peranan, Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi*. Indonesia Corruption Watch.

Soesilo Yoewono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Bandung, Alumni.

KOMPAS. *Komisi Antikorupsi, Siapa Pantas Jadi Anggota*. 28 September 2000